REFORMASI BIROKRASI PERIZINAN BERUSAHA MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)*

Pujiono, Dewi Sulistianingsih, Laga Sugiarto

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang, Indonesia
Email: pujionosh@yahoo.co.id

Disubmit: 25-05-2022 | Diterima: 21-12-2022

Abstract

This paper aims to analyze the implementation of the Online Single Submission (OSS) with its advantages and disadvantages, as well as the obstacles in operating it. This study uses the socio legal method, where the legal aspect is related to the implementing OSS as a form of licensing transformation in the investment sector reduces investment processes and procedures in Indonesia, which have been considered convoluted, high-cost and do not guarantee legal certainty or the many institutions that have the authority to issue permits. Whereas the social aspect analyzes the advantages of the OSS system in displaying real time data from time to time related to business actor data, investor data that can be used as a basis for making a decision. The results shows that the constraints in the implementation of OSS are unstable internet networks in some parts of Indonesia and not all available human resources who operate the OSS system in the regions, which results in various policies made by local governments that contradict the OSS system.

Keywords: *Online Single Submission, Investment, Internet, Human Resources*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menganalisis implementasi *dari Online Single Submission (OSS)* dengan keunggulan dan kekurangannya serta kendala dalam mengoperasionalkannya. Metode yang digunakan adalah *socio legal* dimana aspek legal berkaitan dengan implementasi OSS sebagai bentuk transformasi perijinan dibidang investasi yang memangkas proses dan prosedur investasi di Indonesia yang selama ini dianggap berbelit-belit, berbiaya tinggi dan tidak menjamin kepastian hukum maupun banyaknya lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan perizinan. Sementara aspek sosio menganalisis keunggulan sistem OSS dalam menampilkan data yang secara real time dari waktu ke waktu terkait dengan data pelaku usaha, data investor yang dapat digunakan sebagai pijakan pengambilan keputusan. Hasil penelitian menyatakan bahwa OSS dalam implementasinya menghadapi kendala yaitu tidak meratanya jaringan internet diseluruh wilayah Indonesia dan tidak meratanya SDM yang mengoperasionalkan sistem OSS serta adanya berbagai kebijakan secara teknis yang dibuat oleh pemerintah daerah yang bertentangan dengan sistem OSS.

Kata kunci: Online Single Submission, Investasi, Internet, Sumber Daya Manusia

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bumi, air dan kekayaan alam yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi kemakmuran rakyat menjadi landasan pembangunan di Indonesia, khususnya pembangunan di bidang ekonomi.

Pembangunan di bidang ekonomi dilakukan dengan mengeksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia membutuhkan teknologi tinggi serta sumber daya manusia (SDM) yang terampil harus didukung dengan ketercukupan modal.

Ketercukupan modal menjadi persoalan bagi pemerintah dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam karena keterbatasan modal yang dimiliki.

Keterbatasan modal yang dimiliki oleh pemerintah dicoba diatasi dengan membuka skema investasi dengan tujuan mendapatkan modal dari investor, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing melalui penanaman modal di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia¹ dengan tujuan untuk mengolah potensi ekonomi menjadi ekonomi nyata dengan tujuan mempercepat pembangunan ekonomi nasional.²

Skema investasi yang dibuka oleh pemerintah dalam kenyataannya belum mampu menarik minat investor, khususnya investor asing terlihat dari data indeks kemudahan berbisnis *Ease of Doing Business*

(*EoDB*) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, dimana Indonesia berada pada urutan ke 73 dibawah negara Vietnam (urutan 69) dan Malaysia (urutan 15).

Rendahnya tingkat indeks kemudahan berbisnis di Indonesia menurut Muhammad Faisal selaku *Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core)* disebabkan proses dan prosedur pengurusan perizinan investasi masih sangat rumit dan berbelit-belit serta tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Proses dan prosedur perizinan yang rumit dan berbelit-belit ini sebagai akibat adanya dualisme regulasi penanaman modal di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Dualisme perundang-undangan di bidang penanaman modal ini memunculkan kebijakan yang di bidang investasi bersifat diskriminasi yang mengakibatkan keengganan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia padahal pemerintah sangat membutuhkan modal asing untuk mendorong berkembangnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan.³

Terobosan dibidang hukum dilakukan pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sebagai bentuk

1 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 25 tahun 2007

2 Bagian c. Menimbang UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

3 Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2009), hlm. 31

unifikasi Undang-Undang penanaman modal di Indonesia yang bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi perlakuan antara investor dalam negeri dengan investor luar negeri.

Perubahan substansi regulasi di bidang penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk penyesuaian dinamika politik dan ekonomi⁴ yang berkembang di Indonesia yang menuntut adanya perubahan terhadap regulasi dalam bidang investasi.

Pembaharuan hukum di bidang investasi yang dilakukan pemerintah sebagai bentukantisipasi dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan sekaligus sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah Indonesia dalam keikutsertaannya diberbagai kerja sama internasional, guna menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Pembaharuan hukum dibidang investasi diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *online single submission* (OSS) yang mengatur pengurusan perizinan maupun lembaga-lembaga yang berwenang mengeluarkan perizinan.

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *online single*

submission (OSS) memberikan perlakuan yang sama kepada para investor dengan melakukan penyederhanaan persyaratan dan prosedur investasi sebagai bentuk respon terhadap semakin tajamnya persaingan antar negara untuk menarik modal asing sekaligus sebagai bentuk pemberian jaminan kepastian hukum melalui iklim investasi yang kondusif.

Permasalahan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *online single submission* (OSS) menjadi kajian yang menarik untuk diteliti secara mendalam dari aspek implementasinya.

Oleh karena itu, permasalahan yang hendak dijawab dalam artikel ini adalah apakah *online single submission* (OSS) mampu memberikan jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi dan meningkatkan minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku dari orang-orang yang dapat diamati⁵ dengan menggunakan metode pendekatan *socio legal*, yang didalamnya terdapat dua aspek penelitian, yaitu aspek *legal research*, yaitu obyek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “*norm*” dan

4 Rustanto, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, (Jakarta Timur: Kuwais, 2012), hlm. 47-48.

5 Robert Bogdan dan Steven J Taylor, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Terjemahan Ali Furchan, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21

socio research, yaitu digunakannya metode dan teori-teori ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti melakukan analisis.⁶

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), dengan teknik triangulasi sebagai validitas datanya.

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif sebagai analisisnya dengan model analisis interaktif, yaitu analisis yang bergerak dalam tiga komponen, yaitu; *pertama*, reduksi data (*reduction*), *kedua*, sajian data (*display*), *ketiga*, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing*).⁷

PEMBAHASAN

Penanaman modal merupakan kegiatan bisnis yang lazim dilakukan di setiap negara, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing guna menggerakkan ekonomi.

Penanaman modal asing dimaknai sebagai kegiatan menanam modal di wilayah Negara Republik Indonesia oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.⁸

Penanaman modal asing biasa disebut dengan investasi asing memiliki manfaat yang

cukup luas (*multiplier effect*) bagi negara penerima investasi, seperti menyerap tenaga kerja, menciptakan *demand* bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku; menambah devisa apabila investor asing berorientasi ekspor, menambah penghasilan negara dari sektor pajak; alih teknologi (*transfer of technology*) maupun alih pengetahuan (*transfer of know how*).⁹

Dengan adanya berbagai keuntungan yang diperoleh negara penerima investasi, maka pemerintah Indonesia berupaya untuk menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 dengan mengakomodir asas keterbukaan, asas kepastian hukum, dan asas perlakuan yang sama sebagai bentuk refleksi dari penerapan prinsip perlindungan pada investor (*fair and equitable treatment*).¹⁰

Prinsip *fair and equitable treatment* merupakan prinsip pokok dalam suatu investasi yang mengatur kewajiban *host country* untuk memberikan jaminan transparansi, stabilitas, dan *legitimate expectations* kepada para investor telah diakomodir pada Pasal 6 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 sebagai bentuk penguatan dari Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 yang mengatur hak-hak dari penanam modal, termasuk penanaman

6 Zamroni, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Yoga, 1992), hlm. 80-81.

7 Milles. B, Bathew dan Habermen, A. Michael, *Analisa Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16-21

8 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

9 Yati Nurhayati, "Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Krakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum", *Jurnal Hukum Al'Adl Vol. 5, No. 10*, (Juli-Desember 2013): 14.

10 Miguel Solanes, *Revisiting Privatization, Foreign Investment, and International Arbitration*, (America: ECLAC, 2007), hlm. 72.

modal asing.

Meskipun Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 telah mengatur hak-hak dari para investor, tetapi dalam implementasinya masih membutuhkan berbagai kebijakan untuk menarik minat investor asing seperti (1) adanya tanggungjawab dari pemerintah pusat untuk menyederhanakan regulasi yang menjadi ruang lingkupnya seperti perpajakan, jaminan kepada investor, ketenagakerjaan, dan penutupan usaha; (2) bagi pemerintah daerah diperlukan langkah serius untuk menekan munculnya peraturan-peraturan daerah yang anti investasi.¹¹

A. Kepastian Hukum Problem Investasi

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 sebagai regulasi yang ditujukan untuk menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia, dalam kenyataannya belum dapat berfungsi secara maksimal karena masih kurangnya kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.¹²

Rendahnya kepercayaan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia dikarenakan adanya berbagai kendala internal berupa mekanisme perizinan yang rumit, kondisi perekonomian dan politik yang belum sepenuhnya kondusif, serta upaya penegakkan hukum yang lemah.

Investor sebelum berinvestasi akan melakukan studi kelayakan (*feasibility*)

tentang prospek bisnis yang akan dijalankan, termasuk diteliti pula ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi.

Peraturan perundang-undangan akan menjadi masalah bagi investor terkait dengan nilai kerugian yang dialami oleh investor bukan karena salah mengelola perusahaan, tetapi tidak adanya perlindungan hukum, baik terhadap modal yang ditanamkan maupun barang yang akan diproduksi.¹³

Investor membutuhkan kepastian hukum dalam menjalankan usaha, artinya investor butuh satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya. Ukuran ini disebut *aturan* yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas.

Indonesia oleh para investor dianggap belum memberikan jaminan kepastian hukum yang ditunjukkan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai jenis perizinan yang harus dipenuhi oleh investor serta adanya beraneka ragam administrasi negara dalam pemberian izin yang didasarkan kepada jabatan yang diembannya, baik di tingkat pusat maupun daerah yang berakibat banyaknya lembaga yang memiliki kewenangan memberikan izin dari lembaga administrasi negara tertinggi sampai lembaga administrasi negara terendah.

Ketiadaan jaminan kepastian hukum dibidang perijinan investasi ditunjukkan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang

11 Pasal 7 ayat (3) ACFTA tentang Investasi

12 UNCTAD *Compendium of Investment Law: Indonesia*, 2007, hlm.1-17.

13 Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), hlm. 70.

Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, termasuk didalamnya kewenangan untuk menerbitkan suatu perizinan.

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk memberikan perizinan seringkali dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai jalannya pemerintahan.

Akibatnya terdapat berbagai lembaga yang berwenang memberikan izin, baik secara vertikal maupun horizontal yang berakibat munculnya berbagai macam instrumen hukum di bidang perizinan yang berdampak pada proses dan prosedur pengurusan perizinan menjadi rumit, berbelit-belit, jangka waktu lama serta biaya yang cukup mahal yang pada akhirnya memunculkan ketidakpastian hukum.

Kepastian hukum dalam investasi memegang peranan sangat penting bagi para investor karena sebaik apapun pasar dan bahan baku, namun apabila tidak diimbangi oleh regulasi pemerintah yang bersifat mendukung maka dapat dipastikan para investor akan enggan menginvestasikan modalnya.¹⁴

Kepastian hukum menjadi salah satu keharusan untuk datangnya modal asing

ke suatu negara¹⁵ dengan memberikan perlindungan hukum terhadap modal yang ditanamkan pemodal dan kegiatan usaha investor.¹⁶

Jika ingin investor datang untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka harus disiapkan perangkat hukum yang jelas, dalam arti tidak adanya benturan peraturan satu dengan yang lain¹⁷ seperti peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang berlaku umum di wilayah Indonesia maupun peraturan daerah yang dibuat oleh penguasa daerah yang hanya berlaku di daerahnya saja.¹⁸

Berdasarkan teori kepastian hukum (*Scherkeit des Rechts selbst*), dari Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa: **Pertama**, hukum itu positif, artinya hukum positif itu adalah perundang-undangan. **Kedua**, hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. **Ketiga**, fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, dan mudah dilaksanakan. **Keempat**, hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁹

Teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, memberikan suatu penjelasan bahwa kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau dari perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan

14 Miguel Solanes, Op.Cit, hlm. 72.

15 Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia "Insentif v. Pembatasan* (Jakarta: FH Universitas Al-Azhar Indonesia, 2008), hlm. 146

16 Hernawati R. A. S., dan Joko Trio Suroso, *Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) Vol. 4, No. 1, (2020): 392-408.*

17 Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), hlm. 31.

18 Soerjono Soekamto, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia* Jakarta: UI Press, 1974), hlm. 56.

19 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum, Cet:2*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm.1.

memegang peranan kunci dalam menciptakan adanya kepastian hukum.

Sidharta²⁰ menyebutkan bahwa kepastian hukum mensyaratkan: 1) tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara; 2) instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten serta tunduk dan taat kepadanya; 3) mayoritas warga menyetujui muatan isi dari aturan hukum dengan menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; 4) hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan 5) keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Sidharta hendak menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang disebut kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yang mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Sudikno Mertokusumo²¹ menyebutkan kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut

hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.

Kepastian hukum menurut Sudikno, memiliki keterkaitan yang erat dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²²

Berdasarkan pendapat tentang kepastian hukum dari para pakar, maka dapat diambil suatu persamaan bahwa kepastian hukum pada dasarnya merupakan perangkat hukum tertulis di suatu negara yang secara tegas mengandung makna kejelasan dan dapat dilaksanakan, sehingga perangkat hukum dapat menjamin hak dan kewajiban dengan seimbang sesuai dengan kondisi dalam masyarakat.

Oleh karena itu, kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal terkandung prinsip negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.²³

Kepastian hukum di bidang penanaman modal dapat diartikan adanya jaminan kepastian dalam menjalankan usaha dengan adanya satu ukuran yang dijadikan pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya²⁴ yang diwujudkan dengan adanya konsistensi

20 Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 85.

21 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007), hlm. 170.

22 *Ibid.*

23 *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No.67 Tahun 2007, TLN No.4724, Penjelasan Pasal 3 Ayat 1.

24 Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), hlm. 37

dan unifikasi peraturan perundang-undangan di bidang investasi yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia.

B. Transformasi Birokrasi Perizinan Investasi

Budiman Ginting, menyoroti kerumitan birokrasi perizinan investasi dalam pidato pengukuhan jabatan guru besar tetap USU dengan mengatakan:²⁵ *“Indonesia merupakan sebuah negara yang cukup potensial dalam menarik minat investor, akan tetapi mengapa pada kenyataannya kepercayaan investor belum pulih benar terhadap kondisi hukum di negara ini”*.

Budiman Ginting menghendaki adanya perubahan paradigma di bidang pelayanan, khususnya pelayanan di bidang perizinan dengan mengembangkan sistem pelayanan yang tujuan utamanya menciptakan kemudahan pelayanan, baik pelayanan di bidang perizinan investasi asing maupun investasi dalam negeri

Perubahan paradigma di bidang perizinan harus segera dilaksanakan karena Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, termasuk didalamnya kewenangan untuk menerbitkan suatu perizinan.

Kewenangan pemerintah daerah untuk menerbitkan perizinan diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat yang dalam

praktek dilaksanakan secara kombinasi, dengan asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menerbitkan perizinan karena perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.²⁶

Kewenangan pemerintah daerah untuk mengeluarkan perizinan dalam kenyataannya belum mampu menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif di bidang perizinan yang terlihat dari adanya berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan memprakarsai pelaksanaan konsep *one stop service system* dengan bertumpu kepada *one door service system*, meskipun dalam implementasinya belum mampu memberikan kemudahan dalam bidang pengurusan perizinan.

Konsep *one stop service system* kemudian diperbaiki dengan konsep *one roof service system* yang diterapkan dengan tidak mengurangi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan perizinan.

Konsep *one roof service system* ternyata tidak banyak membawa perubahan pada level bawah, dimana investor masih merasakan prosedur yang berbelit-belit seperti persyaratan, waktu dan biaya yang harus

25 Budiman Ginting, *Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 20 September 2008, hlm. 10-12.

26 Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 168

dikeluarkan oleh investor tidak dapat diukur atau dipastikan.

Hambatan yang terjadi dalam *konsep one roof system*, diatasi pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/125/PUOD tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Atap dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1998 tentang Pelayanan Terpadu Satu Atap.

Implementasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap di daerah banyak mengalami kendala terkait dengan mekanisme perizinan yang masih rumit dan kendala koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sulit mengakibatkan proses perizinan tidak berjalan dengan baik dan berfungsi secara optimal.

Melihat kenyataan tersebut, pemerintah Indonesia mencoba memperbaiki dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan harapan dapat memberi manfaat pengurusan izin usaha secara “*one stop service*” yang menawarkan jasa pengurusan berbagai perizinan yang terintegrasi ke dalam sebuah layanan terpadu.

Konsep PTSP dibuat dengan tujuan untuk:

1. peningkatan kualitas pelayanan (lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat);
2. *Reinventing government*, sebagai proses transformasi sektor publik yang didasari pada prinsip-prinsip: (a). Pemerintah

sebagai pengatur dan pengendali, bukan pelaksana; (b). Pemerintah mendorong iklim kompetisi dalam memberikan pelayanan, (c). lebih berorientasi pada hasil, (d). melayani masyarakat secara optimal, (e). melimpahkan tugasnya kepada partisipasi masyarakat dan kerja tim, (f). berorientasi kepada pasar mengurangi hambatan birokrasi, dan meningkatkan daya saing;

3. *Banishing Bureaucracy* (memangkas birokrasi) dilakukan dengan ditetapkan nya 5 (lima) strategi yakni: (a) strategi inti (pendekatan pada kejelasan tujuan, peran, dan arahan), (b) strategi konsekuensi (pendekatan pada penilaian kerja), (c) strategi pelanggaran (pendekatan pada pilihan pelanggan, kompetensi, dan kualitas), (d) strategi kekuatan (pendekatan pada pemberdayaan dan (e) partisipasi masyarakat, strategi kultur (pendekatan pada nilai, kebiasaan, visi, dan nurani).²⁷

PTSP dalam pelaksanaannya ternyata belum memuaskan dari aspek pelayanan sebagaimana terlihat dari munculnya ungkapan-ungkapan yang dibuat oleh masyarakat dengan analog “satu pintu banyak meja” yang berarti masuk dalam satu kantor, tetapi banyak dinas yang harus ditemui maupun analog “satu pintu banyak jendela” yang diartikan dengan satu kantor tetapi berkas dan dokumen harus dibawa ke dinas terkait diluar serta analog “satu pintu banyak kunci”

²⁷ Muh, Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Cet. I, (Kendari: Unhalu Press, 2011), hlm. 129

yang diartikan satu kantor perizinan tetapi tanda tangan persetujuannya memerlukan kewenangan instansi lain.

Permasalahan dalam sistem perizinan PTSP disebabkan belum ada pola kerja dan hubungan kerja serta pembagian kerja yang jelas yang diantara lembaga yang memiliki kewenangan di bidang berizinan yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Belum semua pelayanan Perizinan dan non Perizinan dilimpahkan kewenangannya ke DPMPTSP.
2. Belum adanya pola hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan non perizinan.
3. Kurangnya kompetensi petugas dalam penyelenggaraan Perizinan
4. Fungsi - fungsi yang ada disetiap *stake holders* belum terlaksana secara efektif.
5. Belum terintegrasinya kewenangan pemberian perizinan
6. Luasnya cakupan sektor perizinan.

Permasalahan dalam sistem PTSP membutuhkan penyederhanaan birokrasi dalam bentuk; pemangkasan tahapan dan prosedur lintas instansi maupun dalam instansi yang bersangkutan, pemangkasan biaya, pengurangan jumlah persyaratan, pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan yang diperlukan, dan pengurangan waktu pemrosesan perizinan dengan melibatkan

pemerintah daerah.

Keterlibatan pemerintah daerah didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencantumkan kewajiban pemerintah daerah untuk mengakomodir kewajiban dari pemerintah daerah dalam membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu dalam memberikan pengesahan dan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, tidak berbelit-belit, berbiaya ringan.²⁸

Koordinasi antara instansi pemerintah pusat dan daerah akan berdampak pada perbaikan realisasi penanaman modal yang membaik secara signifikan²⁹ guna mewujudkan asas desentralisasi dalam bidang perizinan yang diikuti perubahan konsep penyelenggaraan pelayanan publik, dari posisi “dilayani” menjadi “melayani” yang membutuhkan peran besar dari para kepala daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para meningkatkan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para pelaku usaha.³⁰

Perubahan konsep penyelenggaraan pelayanan publik dari “dilayani” menjadi “melayani” menjadi dasar pemikiran dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP)

28 Muhammad Iqbal Fitra Assegaf., Juliani, H., & Sa'adah, N., “Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TERPADU Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 8, No. 2, (2019): 1328-1342.

29 Bagian I. Umum Penjelasan UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

30 Sentosa Sembiring, “Pelayanan Perizinan Secara Elektronik Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Dalam Melakukan Investasi”, *Jurnal Arena Hukum* Vol. 13, No. 3, (2020): 541.

No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.³¹

C. Penguatan Prinsip WTO dalam Sistem *Online Single Submission* (OSS)

Reformasi di bidang perizinan sebagai bentuk penyesuaian dari berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai akibat telah diratifikasinya *General Agreement on Tariffs and Trade/Service* (GATT/S) dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1994.

GATT/S sebagai Organisasi Perdagangan Dunia didirikan dengan 4 (empat) tujuan penting, yaitu³²:

1. meningkatkan taraf hidup umat manusia;
2. meningkatkan kesempatan kerja ;
3. meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia;
4. meningkatkan produksi dan tukar-menukar barang;

Keberadaan GATT berlangsung sampai pada tahun 1994, yang kemudian digantikan oleh WTO. Lahirnya WTO tidak lepas dari upaya pembentukan *International Trade Organization* dan GATT.

WTO lahir menggantikan GATT pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai organisasi

perdagangan dunia. Lahirnya WTO membawa 2 (dua) perubahan yang cukup penting bagi GATT, pertama WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO, kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, khususnya Perjanjian mengenai Jasa (GATS), Penanaman Modal (TRIMs) dan juga dalam perjanjian mengenai perdagangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS), seperti Prinsip Perlindungan Melalui Tarif, Prinsip National Treatment, Prinsip *Most Favoured Nations*, Prinsip *Reciprocity* (Timbal Balik), Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif.

Prinsip *Most Favoured Nations* menjadi prinsip dasar (utama) dalam WTO yang menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif, yakni semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan

Perlakuan yang sama pada para investor juga sebagai bentuk mengakomodir prinsip *National treatment* dan non diskriminasi dalam WTO, yang mengharuskan negara tuan rumah/penanam modal untuk tidak membedakan perlakuan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri di negara penerima.³³

Prinsip-Prinsip dalam perjanjian WTO

31 Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2008

32 Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (selanjutnya disebut buku III) (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 98.

33 J. H. Jack, *International Competition in Services: a Constitutional Framework*, (Washington DC: American Institute for Public Policy Research, 1998), hlm. 27

telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mengatur pemberian perlakuan yang sama terhadap investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing sebagai bentuk dari pengimplementasian prinsip *Trade Related Investment Measures* karena *WTO* menganut prinsip “*the most favored nations*”, yaitu suatu ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara harus diperlakukan pula kepada semua negara anggota *WTO*.

Reformasi di bidang perizinan juga karena konsep diplomasi ekonomi sebagai prioritas dalam politik luar negeri Indonesia, pada masa pemerintahan Joko Widodo³⁴ yang secara tidak langsung telah mengubah sistem pemerintah dari sentralistik ke desentralisasi karena menjadi kunci dalam perdagangan internasional sebagai variabel penting dalam perekonomian dunia, terlebih lagi ketika lahirnya konsep liberalisasi perdagangan yang secara sederhana melibatkan beberapa negara dalam kerangka kerja sama.³⁵

Penyederhanaan persyaratan dan prosedur perizinan menjadi kunci keberhasilan menarik minat investor guna menanamkan modalnya karena penanaman modal bertujuan untuk³⁶ :

- a. meningkatkan kesejahteraan rakyat
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- c. menciptakan lapangan kerja
- d. meningkatkan pembangunan ekonomi

berkelanjutan

- e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
- f. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- h. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Tujuan penanaman modal dapat dicapai apabila ada perbaikan koordinasi antar instansi, baik instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menciptakan birokrasi yang efisien dan berkepastian hukum dengan biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Penguatan koordinasi perizinan mutlak dilakukan seiring dengan kemajuan teknologi dibidang telekomunikasi dan informasi sertaantisipasi globalisasi ekonomi menjadi landasan kebijakan penerbitan regulasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) oleh pemerintah Indonesia.

Penggunaan OSS dalam bidang perizinan juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan standardisasi prosedur dan proses perizinan di seluruh wilayah Indonesia, dan sebagai bentuk pengintegrasian sistem perijinan usaha.

34 Adriana Elisabeth, *Road Map Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2020): Mewujudkan Diplomasi Ekonomi Inklusif, Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015), hlm. 6.

35 *Ibid*, hlm. 26.

36 Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Pengimplementasian sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dilaksanakan dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: (a) dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik; (b) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat seperti:

1. mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
2. memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua *stakeholder* dan memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*.
3. memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat
4. memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)

Manfaat dari Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik secara tidak langsung akan memangkas proses dan prosedur perizinan yang diharapkan akan menarik minat investor, khususnya investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Investor sebelum melakukan investasi di suatu negara biasanya mempertanyakan apakah yang dapat diperoleh dari investasi yang dilakukannya di kemudian hari. Oleh karena itu, para investor sebelum berinvestasi biasanya akan mempergunakan perhitungan-perhitungan berikut:³⁷

1. *Basis Forecasting* atau perkiraan dasar yang berupa informasi dasar dari lembaga advisor atau konsultan sebelum melakukan investasi.
2. *Structuring Forecasting* atau perkiraan struktur dengan mengidentifikasi beberapa faktor yang akan mempengaruhi struktur pembiayaan dalam berinvestasi seperti risiko bisnis negara (*country risk*), kestabilan mata uang, kestabilan politik, penyediaan infrastruktur.
3. *Transmission Forecasting* dilakukan dengan mengamati aspek-aspek yang

³⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), hlm. 192-193

terkait dengan investasinya melalui berbagai saluran seperti media massa, jurnal, bahkan dari mulut ke mulut.

4. *Track record* dengan melakukan investigasi terkait kegagalan dan keberhasilan investasi disuatu negara. Yang telah dilakukan oleh investor lain.
5. *Cost of Service*, dilakukan dengan membuat perkiraan yang mendekati kepastian, seperti mengidentifikasi biaya-biaya yang harus dikeluarkan sebelum bisnis berjalan hingga operasional.

Selain memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, investor juga harus memperhatikan faktor politik, ekonomi, dan hukum, serta beberapa faktor yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan sebelum melakukan investasi, seperti³⁸ :

1. Risiko Menanam Modal (*Country Risk*), sebagai faktor yang cukup dominan yang menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan kegiatan investasi seperti aspek stabilitas politik dan keamanan.
2. Rentang Birokrasi (*Red Tape*), birokrasi yang terlalu panjang biasanya disertai dengan adanya biaya-biaya tambahan yang berakibat munculnya situasi yang kurang kondusif bagi penanaman modal yang mengakibatkan investor mengurungkan niatnya untuk berinvestasi.
3. Transparansi dan Kepastian Hukum, dalam proses dan tatacara penanaman modal akan menciptakan kepastian

hukum serta menjadikan segala sesuatunya menjadi mudah diperkirakan (*predictability*).

4. Alih Teknologi, adanya peraturan kewajiban alih teknologi dari negara tuan rumah dapat mengurangi minat penanam modal mengingat bagi mereka teknologi yang mereka gunakan merupakan modal yang sangat berharga dalam mengembangkan usahanya. Dalam alih teknologi terdapat 4 (empat) hambatan, yaitu: (1) hambatan yang timbul dari ketidaksempurnaan pasar teknologi, (2) hambatan yang disebabkan kurangnya pengalaman dan keterampilan pihak negara penerima dalam menyelesaikan perjanjian hukum yang memadai untuk memperoleh teknologi, (3) hambatan dari sikap pemerintah baik legislatif maupun administratif di negara maju atau negara berkembang yang mempengaruhi pelaksanaan alih teknologi dan perolehannya bagi pihak penerima teknologi di negara berkembang, (4) hambatan seperti sumber keuangan karena tingginya biaya teknologi bagi negara berkembang terutama dalam menemukan faktor-faktor yang menentukan harga yang layak.
5. Ketenagakerjaan, antara penanaman modal dengan ketenagakerjaan terdapat hubungan timbal balik. Penanaman modal memberikan implikasi terciptanya

38 Budiman Ginting, *Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 20 September 2008, hlm. 10-12.

lapangan kerja yang menyerap sejumlah tenaga kerja di berbagai sektor sementara di lain pihak kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberikan pengaruh yang besar pula bagi kemungkinan peningkatan atau penurunan modal.

6. Ketersediaan Infrastruktur, tersedianya jaringan infrastruktur yang memadai akan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan penanaman modal, seperti infrastruktur pokok, di bidang perhubungan (darat, laut, dan udara), energi, serta sarana telekomunikasi biasanya merupakan faktor yang sangat diperlukan oleh calon investor.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), telah memberikan kemudahan serta memberikan jaminan kepastian hukum sehingga menjadi daya

tarik bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

D. Keunggulan Sistem *Online Single Submission* (OSS)

Perbedaan Sistem OSS dengan sistem lama adalah dengan sistem OSS perizinan dikeluarkan terlebih dahulu baru diikuti persyaratan atau komitmen pelaku usaha yang harus dipenuhi dalam tenggat waktu tertentu, sementara sistem lama mensyaratkan beberapa hal administratif yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum ijin keluar serta komitmen yang harus dipenuhi dengan memerlukan prasarana³⁹.

Berdasarkan data penelitian, yang dilakukan peneliti di BKPM diperoleh data tahun 2019 di Indonesia mengalami peningkatan jumlah proyek maupun nilai investasinya dari para investor luar negeri sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Proyek dan Nilai Investasi Asing Tahun 2019

Data Investasi PMA Tahun 2019	Periode Januari-Maret	Periode April - Juni
Jumlah Investasi (US \$ Juta)	6.080.722,6	6.992.000,3
Jumlah Proyek	9.815	12.911

Sumber: BKPM September 2019

Data pada tabel 1, memperlihatkan adanya peningkatan jumlah investasi dan jumlah proyek pada periode April – Juni 2019 dibandingkan pada periode Januari – Maret 2019 dengan peningkatan jumlah investasi

sebanyak 11.277,7 US \$ dan peningkatan jumlah proyek sebanyak 3.096 proyek.

Peningkatan jumlah investasi dan jumlah proyek menunjukkan semakin meningkatnya kepercayaan investor asing untuk berinvestasi

³⁹ Fransiska Soedjono dkk, "Pendampingan Usaha: Penggunaan Online Single Submission Untuk Ijin Usaha", *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, (November 2020): 104-105.

di Indonesia sebagai dampak positif dari kebijakan yang penyederhanaan proses dan prosedur perizinan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).

Kepastian hukum yang tepat dan jelas menjadi suatu kewajiban mutlak⁴⁰ yang harus dibuat oleh negara guna meningkatkan investor untuk berinvestasi.

OSS telah memberikan jaminan kepastian dalam proses maupun prosedur perizinan berinvestasi sebagaimana tercantum pada Pasal 18 ayat (1) PP No. No. 24 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

Penyederhaan proses dan prosedur perijinan diperkuat lagi pada ketentuan

dalam Pasal 19 (1) No. 24 Tahun 2018 yang menyebutkan secara tegas bahwa pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

Penegasan dalam proses dan prosedur perijinan dalam berinvestasi menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Sistem OSS ternyata memiliki keunggulan lain, yaitu mampu menampilkan data jumlah pelaku usaha yang melakukan pendaftaran perijinan secara *real time* (dari waktu ke waktu) secara cepat, tepat dan akurat jumlah pelaku usaha yang melakukan registrasi, aktivasi akun, yang memperoleh NIB, izin usaha dan izin komersial/operasional.

Data yang mampu dicatat dalam sistem OSS selanjutnya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Data Jumlah Pelaku Usaha yang Telah Melakukan Pendaftaran Melalui OSS

Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui OSS Periode 9 Juli 2019 – 30 September 2019	Jumlah	Rata-Rata per hari
Registrasi	781.715	1.745
Aktivasi Akun	728.170	1.625
Nomor Induk Berusaha (NIB)	706.505	1.576
Izin Usaha	926.108	2.067
Izin Komersial/operasional	361.321	807

Sumber: Data dari BKPM September 2019

Data pada tabel 2, menginformasikan jumlah pelaku usaha yang sudah melakukan registrasi dalam kurun waktu antara tanggal 9

Juli 2019 hingga tanggal 30 September 2019 berjumlah 781.715 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima belas). Sedangkan

40 Subaidi, S., "Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah dalam Memberi Jaminan Kepastian Hukum", *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam Vol. 1, No. 2*, (2017): 155-166.

pelaku usaha/calon investor yang telah melakukan aktivasi Akun sebanyak 728.170 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh). Pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) berjumlah 706.505 (tujuh ratus enam ribu lima ratus lima) dengan Izin usaha sebanyak 926.108 (sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus delapan) dan izin komersional/operasional sebanyak 361.321 (tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu).

Sistem OSS, juga mampu menampilkan data pergerakan pengurusan perizinan berusaha per harinya yang secara rata-rata pelaku usaha yang melakukan registrasi rata-rata per hari sebanyak 1.745 (seribu tujuh ratus empat puluh lima) dengan aktivasi akun sebanyak 1.625 (seribu enam ratus dua puluh lima). Sedangkan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 1.576 (seribu lima

ratus tujuh puluh enam). Pelaku usaha yang mengurus perizinan sebanyak 2.067 (dua ribu enam puluh tujuh) dengan 807 (delapan ratus tujuh) pelaku usaha yang mengurus izin komersial/operasional.

Data-data yang ditampilkan secara *real time* mengenai jumlah pelaku usaha di Indonesia secara keseluruhan akan sangat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang investasi yang sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha maupun bagi masyarakat luas, yang akhirnya memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sistem OSS juga berkemampuan untuk memberikan data tentang jenis usaha berdasarkan kepemilikan, yaitu perorangan dan non perorangan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3. Data Jenis Usaha Berdasarkan Kepemilikan Melalui OSS Periode 9 Juli 2019 s/d 30 September 2019

No	Jenis Usaha	Jumlah	Prosentase
1	Perorangan	221.151	38,82%
2	Non - Perorangan	348.463	61,18%

Sumber: Data dari BKPM September 2019

Berdasarkan data dalam tabel 3 terlihat bahwa pelaku usaha non perorangan mendominasi dalam pengurusan perizinan dengan pendaftar sebanyak 348.463 (tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga) atau sebanyak 61,19%, sedangkan pelaku usaha perorangan sebanyak 221.151 (dua ratus dua puluh satu ribu seratus lima puluh satu) atau sebanyak 38,82%.

Sistem perizinan dengan menggunakan sistem OSS juga mampu merekam pendaftaran perizinan yang dilakukan oleh para pelaku usaha UMKM maupun non UMKM.

Data yang diperoleh menunjukkan pelaku usaha UMKM mendominasi pendaftaran dengan 72,95% atau sebanyak 488.912 (empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas) pelaku usaha, sedangkan

pelaku usaha non UMKM yang melakukan pendaftaran sebanyak 181.267 (seratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh) atau sekitar 27,05%. Sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4. Data Skala Usaha Perijinan Berusaha Melalui OSS Periode 9 Juli 2019 s/d 30 September 2019

No.	Skala Usaha	Jumlah	Prosentase
1	Non UMKM	181.267	27,05%
2	UMKM	488.912	72,95%

Sumber: Data dari BKPM September 2019

OSS juga mampu mendata pelaku usaha asal investor yang tersaji pada tabel berikut: yang berinvestasi di Indonesia berdasarkan

Tabel 5. Data Pelaku Usaha Berdasarkan Asal Investor Periode 9 Juli 2019 s/d 30 September 2019,

No	Jenis Penanaman Modal	Jumlah	Prosentase
1	PMDM	518.892	95,62%
2	PMA	23.799	4,38%

Sumber: Data dari BKPM September 2019

Berdasarkan data OSS menunjukkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih mendominasi dalam berinvestasi di Indonesia yang ditunjukkan dengan besarnya jumlah investor dalam negeri sebanyak 518.892 (lima ratus delapan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua) atau sebesar 95,62% dibandingkan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 23.799 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh) atau sebesar 4,38%.

Berdasarkan data tersebut diperoleh fakta bahwa investor dari dalam negeri masih menjadi investor utama dalam pengelolaan kekayaan alam di wilayah Indonesia, sedangkan investor asing berkedudukan sebagai pelengkap dalam pengelolaan kekayaan alam di wilayah Indonesia.

E. Kendala Operasional Sistem Online Single Submission (OSS)

Meskipun sistem OSS telah memberikan dampak positif dalam penyederhanaan proses dan prosedur perizinan serta jaminan kepastian hukum bagi investor, tetapi dalam implementasinya OSS dalam memberikan pelayanan pengurusan izin dalam sistemnya terdapat kelemahan.

Kelemahan pelaksanaan OSS diantaranya kurangnya integrasi sistem dengan sistem yang dimiliki Kemenkominfo sebagai sistem pusat, database perizinan dalam OSS belum terklasifikasi secara jelas sehingga Pemerintah Daerah masih harus input data manual yang memakan waktu lama

Disamping itu OSS sebagai fitur penentuan lokasi usaha belum tersambung

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang karena sistem OSS harus terkoneksi antara izin lokasi, izin perairan, izin lingkungan atau izin mendirikan bangunan bagi usaha yang memerlukan prasarana⁴¹.

OSS juga belum mampu memberikan data yang akurat dan tepat serta rinci terkait dengan karakteristik dari masing-masing pelaku usaha seperti bentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS.

OSS juga belum mampu mendeteksi modal yang diinvestasikan oleh para investor apakah modalnya seluruhnya berasal dari dalam negeri atau ada campuran modal yang berasal dari luar negeri meskipun dalam komposisi yang kecil sehingga prosentase kepemilikan modal tidak dapat dideteksi.

Sistem OSS dalam operasionalnya mengalami kendala tidak meratanya jaringan internet di seluruh wilayah Indonesia karena OSS dioperasionalkan dengan menggunakan jaringan *Web Base*.

Wilayah di Indonesia yang memiliki jaringan internet yang baik seperti wilayah Indonesia Bagian Barat dan wilayah Indonesia bagian Tengah, OSS dapat dioperasionalkan secara maksimal, sedangkan wilayah Indonesia Bagian Timur yang menghadapi kendala jaringan internet, sistem OSS tidak

berjalan dengan baik.⁴² Akibatnya wilayah Indonesia Bagian Barat dan Tengah banyak menerima investasi dibandingkan dengan wilayah Indonesia Bagian Timur.

Kendala lain yang dihadapi oleh sistem OSS yaitu tidak meratanya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor seperti pelabuhan laut, jalan raya, alat telekomunikasi dan sumber daya manusia. Semua sarana dan prasana selama ini masih terpusat di Pulau Jawa. Oleh karena itu perlu kebijakan yang kuat untuk meratakan pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor sehingga investor berminat untuk berinvestasi di luar Pulau Jawa.

Sistem OSS dalam pengoperasionalnya menghadapikendalakurangnya tenaga operator yang terampil dalam mengoperasionalkan sistem OSS yang disebabkan tidak meratanya SDM yang menguasai sistem IT OSS di berbagai daerah akibat dari kebijakan dari pemerintah daerah yang melakukan perekrutan pegawai, khususnya pegawai yang bertanggungjawab terhadap operasional sistem IT OSS.

Kendala kekurangan operator sistem OSS telah diatasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan sering melakukan pelatihan dan pendampingan dalam operasionalisasi sistem OSS kepada seluruh tenaga operator sistem OSS di seluruh Indonesia.

Kebijakan pelatihan tenaga operator sistem

41 Fransiska Soedjono dkk, "Pendampingan Usaha: Penggunaan Online Single Submission Untuk Ijin Usaha", *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4, No. 2*, (November 2020): 104-105

42 Wawancara dengan Lestari Indah (Staf Ahli Menko Bidang Pembangunan Daya Saing Nasional)

OSS ini ternyata tidak dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Akibatnya, kendala kekurangan tenaga terampil yang mengoperasikan sistem OSS akan selalu terulang.

Kendala kekurangan tenaga terampil dalam mengoperasikan sistem OSS diperparah dengan kebijakan rotasi pegawai tanpa adanya persiapan terlebih dahulu, sehingga terjadi ketidaksiapan dari pegawai yang baru saja ditempatkan di bagian IT sistem OSS.

Sistem OSS juga menghadapi kendala dalam mengimplementasikan sistem OSS yaitu terjadinya disharmoni dalam pengimplementasian sistem OSS, dimana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hanya sebagai pembuat kebijakan tentang sistem OSS, tetapi sebagai Lembaga yang menjalankan sistem OSS adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) baik di pusat maupun di daerah.

Secara yuridis, sistem OSS mengalami kendala masih banyak peraturan daerah yang belum disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018. Akibatnya sistem OSS tidak dapat berjalan secara maksimal seperti yang diharapkan sebagai sistem perijinan yang efektif dan efisien.

Kemudahan dalam sistem perizinan di Indonesia pasca berlakunya OSS memang mendapatkan respon yang positif dari

para investor dalam memulai investasi di Indonesia⁴³. Untuk mencapai efektivitas dalam sistem OSS maka perlu di selesaikan setiap hambatan yang terdapat dalam sistem OSS tersebut.

Oleh karena itu secara umum dapat disebutkan bahwa sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam pelaksanaannya mengalami hambatan: (a) Sulitnya akses masuk *website* OSS Pasca *Launching*, (2) Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha pada Informasi Baru di *Website*. (3) Minimnya Akses Internet di Indonesia Bagian Timur, (4) Kendala Penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), (5) Terdapat Pelaku Usaha yang Tidak Melakukan Pemenuhan Komitmen⁴⁴.

KESIMPULAN

Investasi membutuhkan jaminan kepastian hukum baik dalam proses maupun prosedur perizinan maupun jaminan perlindungan terhadap investasi yang telah ditanamkan menjadi kunci dan daya Tarik bagi investor guna berinvestasi disuatu negara yang terwadahi dalam sistem OSS.

Sistem OSS dalam implementasinya mampu meningkatkan jumlah investor asing di Indonesia serta memiliki keunggulan menampilkan data-data yang terkait dengan bidang perizinan secara cepat, tepat dan akurat

43 Desi Arianing Arrum, "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Indonesia", *Jurist-Diction Vol. 2, No. 5*, (2019): 1631-1654.

44 Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Henny Juliani, Nabitus Sa'adah, "Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal Vol. 8, No. 2*, (2019): 1336-1337.

secara *realtime* sehingga mampu meningkatkan *performance* dalam mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan efisien dalam bidang perizinan.

Sistem OSS menghadapi kendala tidak meratanya sebaran jaringan

internet serta sumber daya manusia yang mengoperasikan sistem OSS akibat tidak meratanya persebaran SDM yang mampu mengoperasikan sistem OSS di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*, (selanjutnya disebut buku III). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

B., Matthew Miles dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kuantitatif*, Terjemahan Tjetjep Rohendy Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992

Bogdan, Robert dan Steven J Taylor. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Terjemahan Ali Furchan. Surabaya: Usaha Nasional, 1992

Dewa, Muh. Jufri. *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Cet. I, Kendari: Unhalu Press, 2011

Elisabeth, Adriana. *Road Map Kebijakan Luar Negeri Indonesia (2015-2020): Mewujudkan Diplomasi Ekonomi Inklusif, Berbasis Lingkungan dan Berkelanjutan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015.

Radjab, Abi M. *Buku Ajar Hukum Perizinan*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2015

Rustanto, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*.

Jakarta Timur: Kuwais, 2012

Sihombing, Jonker. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2009

Solanes, Miguel. *Revisiting Privatization, Foreign Investment, and International Arbitration*, America: ECLAC, 2007

Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan, Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Zamroni. *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Yoga, 1992

Jurnal

Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra, Henny Juliani, and Nabitatus Sa'adah. "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah." *Diponegoro Law Journal Vol. 8, No.2*, (2019): 1328-1342.

Arrum, Desi Arianing. "Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi

- Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia.” *Jurist-Diction Vol. 2, No. 5*, (2019): 1631-1654.
- Budiman, Haris dan Suwari Akhmaddhian. “Implementasi Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Kuningan”. *Jurnal Unifikasi Vol. 1, No. 1*, (2013): 1-19.
- R.A.S., Hernawati dan Joko Trio Suroso. “Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law”. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi) Vol. 4, No. 1*, (2020): 392-408.
- Ismayanti, Leny. “Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Malang”. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 4, No. 2*, (2015): 290-300.
- Muallidin, Isnaini, “Kebijakan Reorganisasi Perizinan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Studi Pemerintahan Vol.2, No.2*, (2011): 398-423.
- Maslihatin, Erlina. “Dampak Kualitas Pelayanan Perizinan Terhadap Peningkatan Investasi pada UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur”. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 4, No. 2*, (2016): 27-33.
- Nuria Siswi Enggarani. “Kualitas Pelayanan Publik dalam Perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Boyolali”, *Jurnal Law and Justice Vol. 1, No. 1*, (Maret 2016): 16-28
- Sembiring, Sentosa. “Pelayanan Perizinan Secara Elektronik Sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum Dalam melakukan Investasi.” *Arena Hukum Vol. 13, No.3*, (2020): 528-549.
- Subaidi, S.. “Rekonstruksi Hukum Pasar Modal Syariah dalam Memberi Jaminan Kepastian Hukum”. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam Vol. 1, No. 2*, (2017):155-166.
- Soejono, Fransiska, et al. “Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha”. *Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4, No. 2*, (2020): 103-108.
- Yati Nurhayati, “Perdebatan Antara Metode Normatif dan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum”. *Jurnal Hukum Al’Adl Vol. 5, No. 10*, (Juli-Desember 2013): 14.
- Yusriadi dan Misnawati. “Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Terpadu Satu Pintu)”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 7, No. 2*, (2017): 99-108.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 9 tahun 2015 Tentang

Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017
Tentang Percepatan Pelaksanaan
Berusaha

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik atau
Online Single Submission di Bidang
Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6215)

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.